# *PERAN DAN PEMBAGIAN KERJA KAUM PEREMPUAN PADA AKTIVITAS AGRIKULTUR MASYARAKAT PATRIAKAL MELANESIA:Studi Kasus Pertanian Padi Ladang Di Sahu Halmahera*

Pheres Sunu Widjayengrono

Prodi Ilmu Sejarah Universitas Khairun
Pos-el: sunu.yayan@gmail.com

**Abstrak**

Artikel ini menunjukkan bagaimana peran kaum perempuan dan pembagian kerja dalam aktivitas pertanian *swidden cultivation* masyarakat Sahu. Meskipun pertanian padi ladang di Sahu merupakan pengaruh eksternal, mereka masih menggunakan pola budaya Melanesia pada pola pembagian kerja. Hubungan antara sistem kekerabatan dan pembagian kerja dalam pertanian padi ladang membuktikan sistem patriakal Melanesia yang tersembunyi di balik penampilan fisik non Melanesia dari orang Sahu. Kaum perempuan hadir dihampir seluruh aktivitas fisik dan kaum pria mendominasi aktivitas religius berkenaan dengan siklus pertanian padi.

**Kata Kunci: Sahu, Melanesia, perempuan, padi**

**Abstract**

*This article shows how about woman role and division of works in Sahu's agriculture swidden cultivation activities in Melanesian's patriarchal cultural inheritance. Altough Sahu's paddy swidden cultivation was external influence, they still used Melanesian cultural pattern for pattern of working division. The relation between kinship and division of work in paddy's swidden cultivation evince Melanesian patriarchal which is hidden from Sahu's non-Melanesian physical appearance. Woman existed in almost all physical activities, and the man dominated religious activities related with the cycle of paddy agriculture.*

***Key Words: Sahu, Melanesia, women, paddy***

## A. PENGANTAR

Artikel ini adalah bagian dari tahap awal penelitian Prof. Leontine Visser tentang Empat Puluh Tahun Swidden Cultivation di Sahu, Halmahera Barat beserta perubahannya dimana pada salah satu sub temanya menyertakan tentang peran gender dan perubahannya baik dalam affinal, land orientation, pembagian kerja, maupun peran gender di dalamnya. Akan tetapi artikel ini sendiri hanya terbatas mengenai persoalan gender terutama dalam peran dan pembagian kerja kaum perempuan serta bersifat sinkronik dari satu periode sebelum tahun 1980an dengan paparan data dan analisa

deskriptif secara sederhana dan mendasar mengenai masyarakat agraris tradisional di Halmahera sebelum modernisasi pedesaan dan agrikulturpada tahun 1980an.

Sebagaimana diketahui, pemahaman tentang pembagian kerja berbasis gender dimaknai dengan semua konsep dan praktik pada masyarakat tertentu yang membagi peranan dan pekerjaan berdasarkan jenis kelamin. Secara garis besar pembagian kerja berbasis gender dikategorikan dalam peran produksi, reproduksi dan komunitas. Kerja produktif adalah pekerjaan berkenaan dengan proses produksi barang dan jasa untuk mendapatkan penghasilan dan subsistensi. Jenis pekerjaan kategori inilah yang paling utama diakui dan dianggap lebih bernilai sebagai pekerjaan baik oleh individu maupun masyarakat. Jenis pekerjaan kedua adalah kerja reproduktif yang berkenaan dengan perawatan dan pemeliharaan rumah tangga dan anggotanya. Jenis pekerjaan ini sesungguhnya sangat penting, akan tetapi sering dianggap tidak bernilai sejajar dengan pekerjaan produktif. Jenis pekerjaan terakhir adalah komunitas yang berarti bahwa jenis pekerjaan berkenaan dengan ikatan kolektif baik secara kekerabatan ataupun komunal.

Jika melihat dari ketiga jenis pekerjaan di atas, tentunya mau tak mau harus diakui bahwa kaum perempuan melakukan seluruh kategori tersebut, sedangkan pada umumnya laki-laki hanya terfokus pada jenis pekerjaan pertama. Kondisi serupa juga terjadi dalam masyarakat patrilinineal yang dalam kasus ini terjadi di antara masyarakat tradisional Sahu. Hal ini tidak terlepas dari budaya masyarakat Melanesia yang sebagian besar bergantung atas aktivitas agrikultur tradisional, walaupun dalam banyak hal terjadi berbagai varian tergantung dari dinamika geohistoris mereka.

Perbedaan dinamika geohistoris di antara masyarakat Melanaesia menyebabkan masyarakat berkebudayaan Melanesia di Halmahera, khususnya Sahu melakukan praktek agrikultur yang berbeda dengan masyarakat budaya Melanesia di daratan Papua. Dinamika historis dan keterikatannya dalam kesultanan Ternate menyebabkan begitu mendalamnya pengaruh budaya bagian barat Indonesia yang diwujudkan dalam pertanian ladang berpindah dengan model swidden culitvation. Pertanyaan yang kemudian muncul terkait dengan tema dalam artikel ini adalah apa dan bagaimana peran kaum perempuan dalam aktivitas agrikultur tradisional masyarakat Sahu, serta apakah memiliki relasi dengan budaya Melanesia pada umumnya. Hal ini tentunya menjadi focus diskusi dalam artikel ini yang meberi batasan-batasan pada kurun periode dan nilai sosiologis dari periode tertentu di antara masyarakat Sahu, serta ketiadaan ulasan atas berbagai perubahan pesat akibat modernisasi dan developmentalisme pada periode setelahnya.

## B. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. BUDAYA MELANESIA DAN PENGARUHNYA

#### *Identifikasi Melanesia di Halmahera*

Sebagaimana diketahui bahwa masyarakat Halmahera, khususnya Sahu yang menjadi tema dalam pembahasan ini secara linguistic bagian dari masyarakat berbahasa non Austronesian atau dikategorikan sebagai masyarakat berbahasa Melanesia dari sub bahasa Halmahera Utara. Secara linguistik rumpun bahasa Melanesia dari sub group Northern Halmahera ini berkaitan erat dengan kelompok bahasa West Papua yang umumnya berada di sekitar pedalaman dan pesisir utara Vogelkop atau kepala Burung dimana di dalamnya termasuk kelompok etnis besar Arfak, Mai Brat, dan Ayamaru. (Voorhoeve, 1982:3) Secara biologically genetic atau penampilan fisik, masyarakat Sahu secara khususnya dan Halmahera Non Austronesian pada umumnya memang memiliki perbedaan mencolok dengan adanya percampuran rasa atau genetik Austronesia atau wilayah barat Papua. Kondisi tersebut tak terlepas dari dinamika geopolitik, historis, dan sosiologis antara Halmahera dan Maluku Utara yang mengambil jalan berbeda dimana pada satu sisi dominasi Kesultanan Ternate dan keberadaan ras-ras Austronesia yang telah mapan di Halmahera sangat berlawanan dengan keterisolasian Papua dan minimnya komunikasi interaktif dengan komunitas Austronesia Papua yang jumlahnya sangat terbatas. Dengan demikian pemahaman atas penegasan perbedaan antara ras dan budaya menjadi sangat kabur karena seringkali terjadi fusi di antara pelbagai ras dan budaya sebagaimana apa yang terjadi Halmahera. Hal ini sangat sesuai dengan pendapat Roger Ballard tentang difusi ras dan ethnic di Afrika Barat sebagai berikut:

> "..If we are exploring the impact of racial diversity in biological terms, it follows that we must restrict our analysis to those features of human diversity which are indisputably biologically precipitated. Likewise we must carefully differentiate this activity from parallel explorations of the way in which other aspects of human social and behavioural diversity have been explained in terms of theories which are believed to be biological sound…" (Ballard, 2002:2)

Berbagai antropolog maupun arkeolog mencoba mengeksplorasi realitas races diffusion ini dengan mengkaitkannya dengan pelbagai konsep baik bifurkasi dalam kerangka antropologis dalam kapasitas global, meskipun konsep ini kemudian terbukti saat konsep bifurkasi diterapkan di dalam pembentukan marga atau fam dalam suatu area tertentu dan dalam kapasitas yang lebih kecil. Di sisi lain, para arkeolog membentuk konsep phyllogenetic unit, yang secara esensial paralel dengan konsep bifurkasi walau

dengan perspektif yang lebih luas. (Mills dalam Patricia Caplan (ed.), 2003: 38; Belwood dalam Peter Belwood,etc. (ed), 2006: 18)

Berdasarkan kedua konsep di atas, tetapi ingin mengajukan sebuah perspektif baru bahwa ada warisan yang mengendap dari leluhur Melanesia mereka di antara masyarakat berbahasa non Austuronesia di Halmahera. Kemiripan yang cukup identik antara masyarakat Melanesia Halmahera Utara dengan masyarakat Melanesia lainnya yaitu sistem kekerabatan dan komunalisasi lahan dalam orientasi shifting cultivation dalam mata pencaharian mereka. Hipotesa awal ini tentunya tidak mengabaikan atas eksistensi beberapa komunitas matrilineal di antara masyarakat Melanesia Papua walau dalam jumlah minor. Akan tetapi dominasi patrilineal melalui pernikahan virilokal rupanya cukup mendominasi sebagian besar masyarakat Melanesia dan juga apa yang terdapat di Sahu (Lihat Visser, 1989:145; Untuk Tobelo lihat Platenkamp, 1988:Ch.VI; Untuk Papua lihat Dubouis, 1958; Rizzo,2004; Timmers, 2000; Pamela Stewart dalam J. Meidema, 1994; Stasch, 2009).

***Pewarisan dan Pengolahan Lahan Pada Budaya Melanesia dan Sahu***

Mengingat tema artikel ini lebih terfokus pada gender dalam masyarakat agrikultur, maka ada baiknya jika menjelaskan secara ringkas mengenai keterkaitan antara orientasi kepemilikan lahan dan peran wanita secara umum di dalamnya. Salah satu hal yang patut dicatat adalah adanya generalisasi bahwa keterikatan budaya masyarakat Melanesia sangat erat kaitannya dengan orientasi kepemilikan lahan. Hal ini tak terlepas dari mata pencaharian mereka yang terbagi antara kombinasi hunting gathering dan proto-shifting cultivation yang barangkali dapat disejajarkan dengan apa yang dinyatakan Prof. Platenkamp melalui model shifting cultivation pada masyarakat pegunungan di Nepal, ataupun shifting cultivation secara absolut (Untuk shifting cultivation pada masyarakat pegunungan Nepal dapat dilihat Aryal & Kerkhoff, 2008). Mata pencaharian masyarakat Sahu yang digolongkan dalam swidden cultivation merupakan keunikan tersendiri dan sering dianggap sebagai bagian yang tak termasuk dalam lingkungan budaya Melanesia, meskipun pada hakikatnya mata pencaharian dan pola pemukiman di Sahu pada masa sebelum swidden cultivation dalam bentuk padi ladang menyerupai shifting cultivation dan berubah setelah adanya intervensi eksternal, yang dalam hal ini adalah Kesultanan Ternate (Visser, 1989:23).

Pada masyarakat Melanesia, kepemilikan lahan pada umumnya bersifat komunal. Hal ini berarti tanah dimiliki oleh suatu komunitas yang diikat oleh suatu garis keturunan atau budaya tertentu atau di masa kini lebih dikenal sebagai ulayat. Akan tetapi komunalitas tanah itu sendiri sangat bergantung dari tiap-tiap komunitas dan pada

umumnya sangat ditentukan dengan sistem kekerabatan dan organisasi territorial yang ada. Kepemilikan tanah sesungguhnya bukanlah hak individual, dan proses penggunaan lahan sangat ditentukan oleh kepentingan dan kebijakan kolektif. Hal serupa juga terjadi pada proses pewarisan hak guna tanah. Kondisi ini rupanya umum terjadi di banyak wilayah Melanesia dan dalam banyak kasus khususnya di kota-kota besar di daratan Papua yang mengakomodasi hukum adat menjadi persoalan pelik dan konflik antara pertentangan hak individual dan kolektif (Stasch, 2009:165).

Selain itu pada sebagian besar masyarakat Melanesia orientasi kepemilikan dan pewarisan tanah sangat ditentukan oleh pewarisan berbasis kinship. Memang sangat sulit untuk menggeneralisasikannya mengingat kompleksitas dari masing-masing suku, klan, atau kelompok kerabat tertentu. Banyak varian kekerabatan yang sangat menentukan peran perempuan dalam kepemilikan tanah ataupun pewarisan. Tak dapat dipungkiri beberapa komunitas Melanesia melakukan multiple, multilevel, serta hybrid inheritance, namun tentu saja dalam jumlah minor dan pada beberapa komunitas dianggap sumbang karena kecenderungan utamanya adalah single dan hierarchical inheritance. Berbagai varian juga sangat ditentukan melalui nilai-nilai ideal proses pernikahan atau pertukaran dari tiap-tiap komunitas. Meskipun sebagian besar masyarakat Melanesia cenderung menganggap pernikahan exogamy adalah ideal, tetapi tak sedikit pula yang melakukan pernikahan endogamy sebagai bentuk pernikahan ideal, bahkan di antara masyarakat Sahu sendiri. Kedua jenis pernikahan ini juga memiliki varian yang sangat kompleks dari bentuk direct exchange (tukar-menukar perempuan antara dua lineage atau klan) sebagaimana yang umum terjadi di antara masyarakat Tobelo tradisional, ataupun parallel-cousin marriage (pernikahan antar sepupu) yang sangat dipengaruhi oleh masuknya agama Islam dimana seorang laki-laki menikah seorang perempuan (FBD atau anak perempuan dari adik/kakak lelaki ayahnya) sebagaimana terjadi pada masyarakat Sahu Islam, cross-cousin marriage (pernikahan antara MBD dari lelaki dengan FZS dari perempuan) dan berbagai bentuk varian lainnya (Stasch, 2009:42).

Meskipun tema tentang pernikahan dan kekerabatan merupakan tema menarik, agar tidak keluar dari konteks artikel, saya membatasi pada kecenderungan peran perempuan dalam proses pewarisan atau inheritance itu sendiri. Pada masyarakat Melanesia sendiri pewarisan ditentukan memalui garis keturunan kaum pria. Kaum perempuan tetap memiliki hak pengolahan lahan terutama mewarisi hak ayahnya. Tetapi hak ini hanya bertahan selama satu generasi karena sang ayah tidak memiliki anak laki-

laki dan bahkan status perempuan itu kian melemah jika ia merupakan janda yang kembali ke rumah orang tuanya setelah pergi meninggalkan rumah keluarga suaminya.

Lemahnya posisi perempuan ditandai bahwa proses pewarisan hak komunal sepenuhnya adalah tugas kaum pria. Berbagai komunitas Melanesia juga mengalami apa yang terjadi pada masyarakat Sahu. Seorang perempuan yang telah menikah harus tinggal secara virilokal atau ikut pada keluarga suaminya dan pergi dari keluarganya. Seorang wanita seolah-olah tak memiliki hak dalam warisan apapun, kecuali pada beberapa komunitas seperti pada masyarakat tradisional Sahu yang memiliki katup sosial pada wanita yang menjadi janda akibat ditinggal mati atau bercerai secara adat dengan suaminya. Hak waris tertinggi hampir seluruhnya jatuh kepada anak laki-laki, walau dalam berbagai varian mengenai tingkat derajat tentang pembagian kepada seluruh anak laki-laki atau berdasarkan jenjang usia atau senioritas. Lemahnya kedudukan perempuan dalam pewarisan di antara masyarakat berbudaya Melanesia termasuk Sahu ini menyebabkan seringkali seorang pria lebih memilih untuk mengadopsi anak laki-laki sebagai penerus marga sekaligus hak atas warisannya, karena kaum perempuan secara otomatis dianggap akan menggunakan marga atau warisan dari mertuanya (Visser, 1989:183).

## 2. PERAN DAN PEMBAGIAN KERJA KAUM PEREMPUAN

### *Swidden Cultivation Padi Ladang di Sahu*

Selain persoalan percampuran genetik yang sangat kuat, salah satu pembeda utama kelompok masyarakat Melanesia di Halmahera, dan dalam hal ini Sahu, adalah persoalan agrikultur. Perubahan pola agrikultur tradisional dari kombinasi antara hunting gathering dan shifting cultivation ataupun shifting cultivation secara murni telah berubah menjadi swidden cultivation. Hal ini juga berpengaruh terhadap perubahan orientasi agrikultur dan pemlihan sumber karbohidrat masyarakat di Halmahera. Pada masyarakat Melanesia tradisional di Papua, sumber karbohidrat biji-bijian termasuk beras dan millet atau jawawut, tidak dikenal. Mereka lebih bersandar kepada jenis umbi-umbian seperti talas, keladi, dan ubi jalar (yam) yang berdaging putih, serta meramu sagu. Hal ini juga terjadi pada masyarakat Sahu dan Halmahera sebelum penanaman padi ladang. Sumber karbohidrat lainnya yang bukan merupakan endemic Halmahera dan Papua adalah beras, ubi kayu (singkong), sweet potato (ubi jalar berdaging kuning), dan jagung dimana kemungkinan diperkenalkan oleh masyarat dari bagian barat Indonesia ataupun Eropa. Tidak diketahui dengan pasti sejak kapan persebaran tanaman ini, walau bukti sejarah cenderung menunjukan peran bangsa Eropa dalam persebaran komoditi tanaman endemic yang berasal dari luar Asia Tenggara seperti

jagung dan sweet potatos (ubi jalar berdaging kuning), dan bahkan pada berbagai komunitas menunjukan ubi kayu atau singkong yang merupakan tanaman endemic Afrika diperkenalkan kepada masyarakat lokal oleh bangsa Inggris. (Visser, 1989:34).

Di antara seluruh sumber karbohidrat tersebut, beras dengan tanaman pendukungnya, jawawut (millet) merupakan pembeda utama pola agrikultur antara masyarakat Melanesia di Halmahera dan Papua. Persebaran penanaman padi ladang umumnya terjadi di hampir seluruh bagian Maluku Utara baik masyarakat etnis Galela, Tobelo, Loloda, hingga Makian yang marak sebelum tahun 1980an. Belum diketahui secara pasti bagaimana persebaran penanaman padi beserta ritualnya menyebar di Halmahera. Hipotesis awal persebaran pertanian di Indonesia bagian timur, Indonesia dan wilayah Pasifik diperkirakan bahwa penanaman padi tiba di Halmahera sejak sekitar tahun 1500an karena pada masa tersebut Kalimantan masih merupakan batas bagian barat dari area penanaman tanaman akar atau umbi yang merupakan komoditi bahan pangan terpenting Meskipun demikian kita tidak dapat mengabaikan varietas padi liar yang memang tumbuh natural di tepian sungai dan pemanfaatannya telah dilakukan sejak lama melalui adanya relasi mitologis padi sebagai telur ikan. (Blust 1976:37; Bellwood 1980:59-66; Barrau 1981:337).

Salah satu keunikan dari masyarakat Sahu adalah adanya revolusi agrikultur mereka yang unik dan berbeda dengan masyarakat Melanesia dan Halmahera lainnya. Masyarakat Sahu hampir secara absolut melakukan swidden cultivation dalam penanaman padi ladang. Meskipun banyak versi mengenai pemusatan pola pemukiman di desa terutama terkait dengan intervensi kolonial di abad ke-19, setidaknya ada bukti menujukan aktivitas swidden cultivation pada masyarakat Sahu telah lebih dahulu terjadi terkait intervensi politik Kesultanan Ternate. Hal ini tampak dari mitologi beras itu sendiri yang dikonstruksi dalam orientasi kesultanan sebagai pusat:

> "Beras pertama dibawa dari Jawa ke Ternate oleh seorang ulama Islam. Setelah menempuh suatu perjalanan selama sembilan bulan dengan perahu, Kalimjawa ini tiba di istananya Sultan Musterdam dengan membawa beras, yang kemudian dinamakan "beras sembilan bulan" (e'a ngara siwor). Sultan memberikan benih padi pada Sengaji Mir Ma Gar di Susupu, yang kemudian membagikannya di antara area pesisir Sahu yang Muslim, serta desa-desa Tala'i dan Pa'disua di pedalaman. Sebagai suatu ukuran, Kalimjawa menggunakan sebuah peluru merah. Susupu di pesisir hanya menerima setengah ukuran, sedangkan desa-desa di pedalaman menerima tiga ukuran penuh. Bagaimana mereka di pesisir dapat senantiasa membuat ladang yang baik?"

Hal ini juga diakui dalam mitologi Sahu itu sendiri Keunikan dari masyarakat Sahu terhadap keberadaan beras dan penanaman padi menempati kedudukan khusus di antara masyarakat. "Kita orang Sahu dipaksa untuk menanam padi, sehingga salawako

atau perisai kita berubah menjadi tungku dan senjata kita berubah menjadi ‘u’u’da atau alat pemaras rumput.” (ngene nanga taitaini i-dadi diditam re nanga semarang dadi ‘u’u’da)” (Visser, 1989:59).

***Pembagian Kerja dan Peran Perempuan Dalam Pertanian Padi Ladang***

Pertanian padi ladang dalam model swidden cultivation di Sahu memiliki perbedaan mencolok dengan pertanian komoditi lainnya. Pembeda tersebut adalah bahwa pertanian padi ladang membutuhkan intensitas perawatan dan nilai-nilai religious yang dilekatkan padanya. Tinggginya intensitas jam kerja sejak penanaman, pemeliharaan, hingga pemanenan padi ladang disesuaikan dengan siklus pertanian. Siklus ini pula yang menempatkan masyarakat Sahu tradisional mengorganisasikan seluruh aspek sosial dan budaya mereka guna pelaksanaan siklus padi ladang. Penanaman padi ladang merupakan inti dari seluruh proses pertanian, sosial dan ritual, dari pertimbangan pemilihan suatu lokasi, pertimbangan untuk mempersiapkan sebuah kebun tahun kedua, hingga saat ladang ditinggalkan atau ditanami dengan pohon kelapa. Bahkan keputusan untuk membiarkan lahan selama empat tahun lebih memiliki peran yang penting. Hal ini dimaknai oleh orang Sahu bahwa tidak ada akan mengatakan: “Panen sudah masuk, kini saatnya kita akan membiarkan lahan”. Kebun ladang yang dibiarkan bukan merupakan tanah buangan, tetapi lebih kepada fungsi periode beristirahat dalam proses penggunaan lahan.

Menurut Prof. L. Visser penanaman padi ladang di Sahu melaksanakan 5 fase dan 9 tahapan melalui klasifikasi Sahu sebagai berikut. Adapun kelima fasenya sebagai berikut:

1. Pemilihan lokasi ladang
2. Pembersihan lahan
3. Pembakaran
4. Penanaman
5. Periode dimana lahan ditinggal.

Selain kelima fase tersebut, ada sembilan tahapan berdasarkan kelima fase yang dikategorisasikan oleh masyarakat Sahu sebagai berikut.

1. Disa-sano : Eksplorasi lokasi ladang padi
2. Ci’boron : Pembabatan dan pembersihan semak belukar
3. Tawele ate : Penebangan pohon
4. Tau’u : Pembakaran lahan
5. Tuju’u : Penanaman padi
6. ‘U’dara : Pemarasan atau pembersihan rumput

7. ‘Utu’u : Pemanenan
8. Sa’ai lamo’o : Upacara adat (atau ngorom lamo’o)
9. ‘U’dara ma jalame: Peninggalan lahan atau pembersihan lahan dan pembuatan kebun tahun kedua (Visser, 1989:90).

Penjelasan masing-masing tahapan di atas sangat menarik dan telah dijelaskan melalui karya Prof. Leontine Visser, namun pembahasan atas artikel ini sendiri terfokus pada pembagian kerja berbasis gender. Tabel di bawah ini menunjukan pembagian kerja berbasis gender berdasarkan perpaduan antara kelima fase dan kesembilan tahapan di atas dan dapat dikorelasikan dengan kelima fase tersebut adalah sebagai berikut:

**Tabel Pembagian Kerja Berbasis Gender**

| Pekerjaan | | | Pria | Perempuan | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|
| Fase 1 Pemilihan lokasi ladang padi | Tahap 1 | Pertimbangan sebelum pemilihan lokasi: *disa-sano* | O | X | |
| | | Pembentukan kelompok kerja (*rion*) | O | X | |
| | | Pengaturan waktu | O | X | |
| | | Pengaturan batas-batas dan penandanya | O | X | |
| | | Ritual: *dolagumi tana’a* | O | O | Dipimpin oleh pria |
| Fase 2 Pembersihan | Tahap 2 | Pembabatan dan pembersihan semak belukar: *ji’boron* | O | O | |
| | | Pembersihan rerumputan tinggi: *ji’boron toma re’u* | O | O | |
| | | Pembersihan rerumputan rendah: *jo’boron toma a’du* | O | O | |
| | | Ritual : *dolagumi ji’boron* | O | O | Dipimpin oleh pria |
| | Tahap 3 | Penebangan pohon: *dawele ate* | O | O | |
| | | Ritual : *dolagumi dawele* | O | O | Dipimpin oleh pria |
| | | Pembangunan tumpukan atau rak-rak kayu bakar | O | O | |
| Fase III. Pembakaran lahan | Tahap 4. | Pembakaran : *dau’u* | O | X | Berhubungan ritual dan kepercayaan |
| Fase IV. Penanaman padi | Tahap 5 | Pendinginan | O | X | Berkenaan tubuh |
| | | Pengaturan waktu dan arahan | O | X | |
| | | Pembersihan permukaan: *tade’e ma rere’u* | O | O | |
| | | Pencangkulan : *cacu’u* | O | O | |
| | | Penggarukan : *barisi* | O | O | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Ritual pendinginan : penanaman jagung (*bitung 'omanga*) | O | O | Dilakukan suami dan istri pemilik lahan |
| | | Penanaman : *tuju'u, 'duron*, *jujumu* | O | O | |
| | | Makan | O | O | |
| | Tahap 6 | Penyiangan rumput: *'u'dara ma jeremoto* | X | O | |
| | | Penyiangan kedua kali : *'u'dara sou'di'di* | X | O | |
| | | Ritual : *diriwa* | O | X | |
| | | Ritual serta kontrol hama praktis dan wabah | O | X | |
| | Tahap 7 | Persiapan : *bari* dan *golago* | O | O | |
| | | Ritual : *ngumor* | X | O | Dipimpin oleh wanita tua |
| | | Pemanenan : *'utu'u* | O | O | |
| | | Makan | O | O | |
| | | Pengisian lumbung (*titila*) | O | X | |
| | | Ritual : *gugu'u* | O | O | Dipimpin oleh pria |
| | | Penginjakkan bulir padi (*to'u*) dan pemisahan padi (*taro'o*) | X | O | |
| | Tahap 8 | Upacara adat: *ngorom lamo'o* atau *sa'ai lamo'o* | O | O | |
| Fase V. Periode Peninggalan Ladang | Tahap 9 | Peninggalan lahan sampai menjadi belukar: *jalame* | X | X | |
| | | Pembuatan kebun tahun kedua : *u'dara ma jalame* | X | O | Berhubungan dengan tanaman subsisten |
| | | Penanaman kelapa: *wa'gele ma ngi'i.* | O | X | |

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa pembagian kerja berbasis gender pada penanaman padi ladang model swidden cultivation di Sahu secara umum dilakukan baik oleh kaum pria maupun perempuan. Akan tetapi jam kerja kaum wanita secara umum lebih banyak dibandingkan dengan kaum pria karena terlibat di hampir seluruh aktivitas terkecuali pembakaran dengan alasan spiritual. Walau kaum wanita dianggap melakukan pekerjaan yang dianggap mengeluarkan energi lebih ringan, eksistensi mereka di hampir seluruh aktivitas menunjukan peran penting kaum perempuan. Situasi lainnya adalah keberadaan kaum pria mendominasi hampir seluruh aktivitas ritual.

Salah satu hal yang patut disorot adalah fase kelima yaitu periode guna mengistirahatkan tanah. Setelah masa singkat periode ini, justru kaum wanita yang bertanggung jawab untuk melakukan aktivitas pada apa yang dinyatakan oleh Prof Leontine Visser sebagai penanaman kebun tahun kedua. Komoditi subsisten sekunder

seperti tanaman karbohidrat non padi, ataupun sayur-sayuran menunjukan kaum perempuan memiliki peran lebih penting dalam menjaga ketersediaan subsistensi rumah tangga. Hal yang patut dicatat adalah bahwa kelapa sendiri merupakan komoditi yang baru diperkenalkan pada awal akhir abad ke-19 sebagai tanaman industri dan Visser menyatakan bahwa kian maraknya penanaman kelapa sangat dimotivasi oleh kian meningkatnya kebutuhan atas uang tunai (Pheres Sunu, 2013:87). Pada periode sebelum kelapa menjadi komoditi primadona, kaum pria biasanya hanya sedikit tertarik pada penanaman tahun kedua kecuali tanaman tertentu seperti buah-buahan sebagai penanda atas hak guna lahan secara individual atau melakukan aktivitas berburu sebagaimana dilaporkan oleh pendeta zending Hueting di akhir abad ke-19.

Kondisi ini menandakan bahwa kaum perempuan memiliki jam kerja lebih banyak, khususnya berkenaan dengan aktivitas agrikultur di Sahu. Jika seorang perempuan bertanggungjawab mengurus kebun tahun kedua tentunya tentunya secara bersamaan berpartisipasi dalam penanaman padi ladang bagi rion (kelompok kerja) atau rera (pengelompokan extended family yang terkecil dari model Sahu) suaminya yang ditanam atau dilaksanakan di lahan lainnya. Situasi tersebut memiliki kemiripan secara general dengan pembagian kerja pada masyarakat Melanesia yang didominasi oleh sistem patriakal. Berbagai studi etnografi atau catatan monograf dari kaum zendeling di masa lalu menunjukan kondisi serupa walau bukan dalam bentuk pertanian padi ladang. Kaum wanita memiliki peran penting dalam aktivitas agrikultur tradisional Melanesia terhadap penanaman umbi-umbian, sayur, dan kebutuhan subsitensi suatu rumah tangga.

Selain persoalan di atas, hal menarik lainnya yang patut dicermati adalah dominasi kaum pria dalam hal-hal berkenaan dengan pengambilan keputusan dan religi. Meskipun Visser secara tegas menyatakan bahwa konsep penanaman padi ladang beserta nilai-nilainya mengadopsi dari budaya di Indonesia bagian barat dimana padi dan bumi dianalogikan sebagai perempuan, pembawa kehidupan, dan cenderung bersifat feminim, pembeda utamanya adalah peran penting kaum pria khususnya religi. Hal ini menjadi menarik karena kecenderungan sistem religi dan kekerabatan di antara masyarakat Melanesia banyak yang memiliki kondisi serupa. Dominasi kaum pria atas berbagai sistem religi baik animism, dinamisme, totem, bahkan hingga shamanisme memberi petunjuk serupa. Meskipun demikian, tak dapat dipungkiri bahwa akulturasi antara budaya Melanesia dan non Melanesia berkenaan dengan penanaman padi ladang tak dapat dihindari (Untuk peran kaum pria dalam ritual dapat dilihat dalam

Platenkamp, 1988; peran pria pada masyarakat papua dapat dilihat dalam Timmers, 2000; untuk akulturasi religi pada padi dapat dilihat dalam Pheres Sunu, 2017).

## C. PENUTUP

Pertanian padi ladang di antara masyarakat Sahu yang menjadi fondasi dari seluruh sistem budaya mereka di masa lalu merupakan akulturasi budaya dari pengaruh eksternal di masa lalu. Kaum perempuan memiliki peran dominan terutama dalam aktivitas produksi. Hal ini tampak dari dari eksistensi kaum perempuan yang terlibat di hampir seluruh tahapan produksi kecuali pembakaran. Meskipun padi dianalogikan secara feminim, fungsi ritual berkenaan dengan aktivitas penanaman padi ladang di Sahu menunjukan dominasi kaum pria. Akan tetapi sangat gegabah bila menghubungkan pembagian kerja perempuan ini dalam konotasi gender yang negatif. Masih banyak data-data etnografis dan detail-detail lainnya tentang masyarakat Sahu yang tak dapat diungkapkan di artikel ini karena hanya mengangkat aktivitas agrikultur dari pembagian kerja dalam siklus pertanian pada ladang.

Pemahaman konsep yang dibangun dari artikel ini sendiri adalah bagaimana masyarakat Sahu yang secara linguistic dikategorikan sebagai rumpun Melanesia tidak hanya mewarisi secara kebahasaan itu sendiri. Ada fakta-fakta sosio kultural yang mengendap berkenaan dengan konsep paling mendasar dalam masyarakat yaitu kekerabatan yang memiliki kecenderungan serupa dengan leluhur Melanesia mereka meski dalam banyak hal telah terpengaruh oleh unsur-unsur eksternal mengingat dinamika geohistoris yang berbeda-beda. Akan tetapi hal ini hanya merupakan konsep saya secara pribadi dan terlalu dini untuk menggeneralisasikannya sebagai sebuah hipotesis. Relasi asumsi-asumsi dasar sebatas konsep ini masih harus diverifikasi secara metodologis dan komparatif, mengingat bahwa di antara masyarakat Melanesia secara keseluruhan memiliki kompleksitas yang rumit. Salah satu contohnya adalah keberadaan masyarakat matrilineal di antara kelompok masyarakat berbudaya Melanesia itu sendiri.

## DAFTAR PUSTAKA

Arya;, K. P. & E. E. Kerkhoff. 2008. *The Right To Practice Shifting Cultivation As A Traditional Occupation in Nepal.* Kathmandu: ILO Press.

Ballard, R. 2002. “Race, Ethnicity and Culture” dalam *Martin Holborn (ed.) New Directions in Sociology*. Ormskirk:Causeaway.

Bellwood, P, James J.F , Darrell T (Ed.), *The Austronesians: Historical and Comparative Perspectives.* Canberra: ANU Press.

Dubois, J. 1958*. Land en Volk in Nieuw Giunea, Schalkes Nederlansch Nieuw Guinea, No. 27c.*

Mills, D. 2003. "Like A Horse in Blinkers? A political history of antrhropolgy's research ethics" dalam *Patricia Caplan, ed. The Ethics of Anthropolgy: Debates and Dilemma*. London: Routledge.

Pamela J.S. 1997. "Ritual trackways and sacred paths of fertility" dalam *J. Meidema, etc. (ed.), Perspectives on the Bird's Head of irian Jaya. Proceedings of the Conference*. Leiden, 13-17 October.

Platenkamp, J. D. M. 1988. *Tobelo, Ideas and Values of North Moluccan Society*. Leiden: Repro Psychologie.

Rizzo, S.G. 2004. "From Paradise Lost to Promise Land, Christianity and the Rise of Papuan Nationalism". *Disertasi* University of Wollongong.

Stasch, R. 2009. *Society of Others: Kinship and Mourning in a West Papuan Place, Berkeley.* Los Angeles, London: UCLA Press.

Timmer, J. 2000. Living With Intricate Futures; Order and confusion in Imyan Worlds, Irian Jaya, Indonesia. Nijmegen: Katholieke Nijmegen Universiteit.

Visser, L.E. 1989. *My Rice is My Child. Social Territorial Aspects of Swidden Cultivation in Sahu, Eastern Indonesia*. Dordrecht: Forris Publications.

Voorhoeve, C. L. 1982. *The Makian Languages and Their Neighbours*. Canberra: Pacific Linguistic.

Widjayengrono, P.S. 2013. *Pertanian Rakyat dan Perkebunan Eropa di Karesidenan Ternate, 1860-1920.* Ternate: LepKhair.

_____. 2017. *Akulturasi Budaya Melanesia dan Austronesia di Maluku Utara dan Papua Barat*. Laporan penelitian Mandiri Universitas Khairun Ternate.